

Minahasa Utara, 28 April 2022

No. : 118 /ABK/DIR/04.2022

Kepada Yth,  
Perbarindo Pusat dan MediaBPR  
Di  
Tempat

**Perihal: Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Arya Bira Karsa 2021**

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bahwa BPR wajib menyampaikan Laporan penerapan tata kelola ke Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR dan Media atau majalah ekonomi, maka dengan ini kami sampaikan Laporan tersebut periode Tahun 2021.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT BPR Arya Bira Karsa



**Aswin S.W. Kotambunan**  
Direktur Utama



**Ayeng V. Kaligis**  
Direktur

Cc : -Dewan Komisaris PT BPR Arya Bira Karsa  
-File

No. : 110 /ABK/DIR/04.2022


Kepada Yth,  
Kepala  
Otoritas Jasa Keuangan  
Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara  
Jl. Diponegoro No. 51  
Manado

**Perihal: Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Arya Bira Karsa 2021**

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bahwa BPR wajib menyampaikan Laporan penerapan tata kelola, maka dengan ini kami sampaikan Laporan tersebut periode Tahun 2021.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT BPR Arya Bira Karsa

  
**Aswin S.W. Kotambunan**  
Direktur Utama  
**Ayeng V. Kaligis**  
Direktur

Cc : -Dewan Komisaris PT BPR Arya Bira Karsa  
-File

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT BPR Arya Bira Karsa

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496285-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601919-26042022074821

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bpr.aryabirakarsa@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-26 07:48:21



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

2021

**LAPORAN  
TATA KELOLA**

 [bankarya.co.id](http://bankarya.co.id)  
 [bank arya](#)  
 [bank arya official](#)  
 0813 4293 2434



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jalan Raya Manado Bitung, Kolongan Tetempangan Kec. Kalawat  
Minahasa Utara

Nomor Telepon : 04317008567

Penjelasan Umum : Melihat pencapaian Tahun 2021, PT. BPR Arya Bira Karsa menyadari bisnis BPR telah berkembang baik fungsi funding, lending, laba dan aset. Untuk itu BPR menyadari sangatlah penting penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance dengan menerapkan prinsip-prinsipnya yakni T.A.R.I.F (Transparansi, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness) di semua jenjang organisasi dan kegiatan usahanya. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat, para pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam PT. BPR Arya Bira Karsa karenanya BPR berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan praktek perbankan yang terbaik sehingga BPR Arya Bira Karsa dapat terus mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Aswin Sonny Wemy Kotambunan	Direktur Utama	1 Menentukan Kebijakan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan perusahaan, 2 Bertanggung jawab atas penyusunan garis-garis kebijaksanaan perusahaan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum serta perkreditan dalam upaya membangkitkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan bank, 3 Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan, 4 Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun, 5 Mengadakan perubahan-perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha bank, 6 Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah, 7 Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku bersangkutan, 8 Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik sesuai dengan aturan yang ada, 9 Menandatangani surat keputusan direksi secara sendiri atau bersama-sama yang meliputi segala gaji, promosi, mutasi, dan pemberhentian karyawan, 10 Membina hubungan dengan para pejabat Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Perbarindo, Pemerintah Daerah, PPAK dan instansi lainnya, 11 Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukan pengabdian dan kesetiaannya kepada bank, 12 Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh dewan komisaris, 13 Menandatangani surat keputusan direksi secara sendiri atau bersama-sama yang meliputi segala gaji, promosi, mutasi, dan pemberhentian karyawan, 14 Menandatangani laporan-laporan bank yang penting khususnya laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak extern lainnya, 15 Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas usul dari para Kepala Bidang unit kerja/bagian personalia, 16 Mengendalikan dan mengawasi tugas pemberian persetujuan kredit, pengelolaan sdm, pengawas dan pendanaan bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Ayeng Veibe Kaligis	Direktur	1 Memonitor dan mengevaluasi laporan pengendalian biaya, perubahan dan perkembangan pendapatan bank secara periodic dan berkesinambungan, 2 Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional bank/perusahaan dan membawa misi pengenalan dan misi perusahaan pada umum dengan melakukan fungsi humas serta kepatuhan, 3 Bertanggung jawab atas penyusunan laporan/program dan realisasinya pada setiap periode pertanggung jawaban anggaran, 4 Mewakili Direksi dalam hal Direktur Utama sedang berhalangan, 5 Mengkoordinasi dan mengarahkan semua kegiatan-kegiatan pada setiap bagian, 6 Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja, 7 Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan bank, 8 Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan, 9 Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi, 10 Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk rapat-rapat Direksi dan komisaris, 11 Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya-biaya operasional, 12 Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan sampai ke unit terbawah, 13 Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur Perusahaan, 14 Melaksanakan Tugas kepatuhan dan penerapan manajemen risiko dalam setiap aspek organisasi.

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Adapun rekomendasi Dewan Komisaris yang telah di tindak lanjuti Direksi yakni BPR melakukan prospek kredit dan telah membuat perjanjian kerjasama dengan RS Advent dan Uni Konferens GMAHK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Billy Donald Kumolontang	Komisaris Utama	1 Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham, 2 Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan,3 Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris,4 Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat,5 Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari. 6 Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris,7 Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas, 8 Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi.9 Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik.
2	Ronald Christian Welong	Komisaris	1 Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank;2 Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya, 3 Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis, 4 Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan,5 Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,6 Bersama-sama dengan Komisaris utama membuat dan melaporkan hasil pengawasan dan kinerja bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, 7 Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan,8 Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait,9 Menghadiri semua rapat Pemegang Saham, 10 Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja, 11 Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

## Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris melakukan pengawasasn terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rekomendasi Dewan Komisaris untuk memingkatkan kredit dengan melakukan prospek ke RS Advent dan Uni Konferens Advent (GMAHK)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Periode 2021 modal inti BPR < 50.000.000.000,- sehingga BPR belum membentuk komite atau belum memiliki komite Audit, komite Pemantau Risiko dan komite Remunerasi dan nominasi, Direktur Utama membawahi fungsi Audit dan Pemantau Risiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Periode 2021 modal inti BPR < 50.000.000.000,- sehingga BPR belum membentuk komite atau belum memiliki komite Audit, komite Pemantau Risiko dan komite Remunerasi dan nominasi, Direktur Utama membawahi fungsi Audit dan Pemantau Risiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Periode 2021 modal inti BPR < 50.000.000.000,- sehingga BPR belum membentuk komite atau belum memiliki komite Audit, komite Pemantau Risiko dan komite Remunerasi dan nominasi, Direktur Utama membawahi fungsi Audit dan Pemantau Risiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Masing-masing anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Aswin Sonny Wemy Kotambunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ayeng Veibe Kaligis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Aswin Sonny Wemy Kotambunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ayeng Veibe Kaligis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Billy Donald Kumolontang	1.907.850.000	38,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama BPR juga merupakan Pemegang Saham Pengendali BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Billy Donald Kumolontang	Yayasan Kornelius Internasional	50,00
2	Billy Donald Kumolontang	Manado Independent School	50,00
3	Billy Donald Kumolontang	PT Cita Landasan Jaya	25,00
4	Billy Donald Kumolontang	PT Cita Laras Karsa	25,00
5	Billy Donald Kumolontang	PT Cita Lintas Kasih	25,00
6	Billy Donald Kumolontang	PT Anugerah Bayu Karsa	25,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama BPR memiliki perusahaan lain yang juga merupakan Group BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Billy Donald Kumolontang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ronald Christian Welong	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan dewan komisaris lain, dewan direksi dan pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Billy Donald Kumolontang	Tidak ada	Tidak ada	1. Fionne Lengkong-Istri, 2. Charlene Lynne Kumolontang-Anak, 3. Andri Bjorn Kumolontang-Anak
2	Ronald Christian Welong	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemegang saham BPR merupakan keluarga inti dari Komisaris Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	339000000	2	153000000
2	Tunjangan	2	73500000	2	34500000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>412500000</b>		<b>187500000</b>

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris belum ditetapkan pada RUPS Tahun 2021. Kebijakan remunerasi akan dibahas pada RUPS Tahun 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil Dinas	Mobil Dinas
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	-	-

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris belum ditetapkan pada RUPS Tahun 2021. Kebijakan remunerasi akan dibahas pada RUPS Tahun 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,30	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,20	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,09	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,33	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,95	1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Manajemen BPR menaruh perhatian terhadap kesejahteraan personilnya dengan memberi upah dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kinerja perusahaan serta staff BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	13-01-2021	2	Evaluasi Kinerja BPR Semester 2 Tahun 2020
2	17-01-2021	4	1. Target Bank Funding dan Lending, 2. Pipeline dan Pencapaian Funding dan Lending setiap bulan dan pencapaian 17 Januari 2021, 3. Rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Bank Arya
3	03-02-2021	4	1. Pipeline Funding dan Lending Februari 2021, 2. Rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Bank Arya, 3. Melakukan prospek kredit dengan RS Advent dan Uni
4	08-03-2021	4	1. Peningkatan Laba Bulan Maret, 2. Kerjasama kredit dengan kantor daerah advent Kotamobagu dan Tahuna
5	19-05-2021	4	1. Membahas temuan OJK, 2. Pembahasan pencapaian Funding dan Lending April s.d 18 Mei 2021, 3. Perekrutan Pegawai Funding, Lending dan Audit Internal sesuai permintaan OJK
6	28-06-2021	4	1. Kontrol rasio-rasio da kredit, 2. Review kembali penurunan suku bunga Tabungan Arya dan Tabungan Bisnis, 3. Penyesuaian Gaji Pengurus 20%
7	17-07-2021	2	Evaluasi Kinerja BPR Semester 1 Tahun 2021
8	03-09-2021	4	1. Pelaksanaan HUT Bank Arya, 2. Pelaksanaan Anjagsana ke Panti Werdha dan Panti Asuhan, 3. Evaluasi Pencapaian Funding dan Lending Agustus
9	05-11-2021	4	1. Kinerja Pencapaian Target Oktober, 2. Proyeksi Funding dan Lending November s.d Desember, 3. Proyeksi rencana bisnis tahun 2022
10	10-12-2021	4	1. Perencanaan internal tahun 2022 dibuat lebih sistematis per bagian, 2. Pencapaian Funding dan Lending November 2021, 3. Kompensasi bonus akhir tahun

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris menyadari tugas dan tanggung-jawabnya sebagai dewan pengawas dan aktif melakukan rapat guna mengevaluasi perkembangan BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Billy Donald Kumolontang	10	0	100,00
2	Ronald Christian Welong	10	0	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris menaruh perhatian dan aktif menghadiri setiap rapat pengurus yang dilaksanakan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat penyimpangan internal (fraud) baik pada tahun laporan maupun tahun sebelumnya baik yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada permasalahan hukum Perdata maupun Pidana yang di hadapi BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sampai dengan periode 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan di BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210909	Kegiatan Sosial	Anjagsana dalam rangka HUT BPR Arya Bira Karsa	Panti Asuhan Bukit Harapan dan Panti Werda Damai Ranomuut	8.495.200
2	20211222	Kegiatan Sosial	Donasi kepada lansia dalam rangka Natal 2021	Kelompok Lansia	10.000.000

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR menyadari tanggung jawab sosialnya dan periode 2021 berupaya BPR menuntaskan tanggung jawab sosial tersebut dengan beranjagsana ke Panti Asuhan dan Panti Werda

Nama BPR	: PT BPR Arya Bira Karsa
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jalan Raya Manado Bitung, Kolongan Tetempangan Kec. Kalawat Minahasa Utara
Nomor Telepon	: (0431)7008567
Modal Inti BPR	: 5.020.625.000,00
Total Aset BPR	: 81.241.223.931,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,7
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Periode 2021 masih terdapat kekosongan pada struktur organisasi BPR untuk posisi pejabat eksekutif yang membawahi fungsi audit internal, manajemen risiko dan kepatuhan namun penerapan tata kelola yang baik sesuai aturan telah dilaksanakan oleh setiap satuan kerja di BPR. Hal ini ditunjukkan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan ke Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan aktif dari Dewan Komisaris yang nampak pada frekuensi kehadiran dalam rapat, pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Direksi yang dapat dilihat dari pertumbuhan nilai positif bisnis BPR pada funding, lending, laba dan aset. Dan untuk pemenuhan kelengkapan struktur organisasi khususnya dalam fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal sudah termasuk dalam rencana bisnis BPR yang akan direalisasikan di tahun 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,45	0,10	1,14	0.228	Direksi menyadari tugas dan tanggungjawabnya dan menjalankannya sesuai pedoman dan aturan yang berlaku.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,40	0,10	1,11	0.167	Dewan Komisaris berperan aktif dalam pengawasan terhadap tugas tanggung jawab direksi dan pertumbuhan BPR yang terbukti dari rapat yang diadakan secara berkala guna memonitor perkembangan dan pertumbuhan BPR.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal inti BPR < dari Rp. 50.000.000.000,- dimana BPR belum membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Periode 2021 tidak terdapat transaksi atau kegiatan yang mengandung unsur benturan kepentingan yang merugikan BPR.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,80	1,36	0,13	3,29	0.329	BPR menerapkan fungsi kepatuhan di seluruh jenjang organisasinya sesuai pedoman dan aturan yang berlaku dan memonitor operasional BPR sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk dalam hal ketepatan dalam penyampaian laporan ke OJK dan otoritas lainnya.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	2,10	1,40	0,25	3,75	0.375	Periode 2021 BPR belum mengangkat pejabat eksekutif yang membawahi fungsi audit intern, pelaksanaan fungsi ini dijalankan oleh unit kerja akuntansi dengan kontrol aktif dari Direktur Utama.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,60	0,10	1,20	0.030	BPR menunjuk KAP yang kompeten dan terdaftar di OJK serta melaporkan hasil laporan audit independent tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai aspek dan ketentuan yang berlaku.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	0,63	0,10	2,23	0.223	BPR menerapkan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern di seluruh jenjang organisasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,15	1,25	0.094	Dalam penyaluran kredit BPR memperhatikan ketentuan BMPK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis BPR disusun dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi misi BPR yang juga mempertimbangkan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta setiap bulannya dilakukan evaluasi terhadap realisasi rencana bisnis BPR.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	BPR selalu berupaya memelihara sistem informasi manajemen dan kualitas SDM yang kompeten sehingga dapat menyajikan laporan keuangan dan non keuangan yang transparan, lengkap, akurat, kini dan utuh.
Nilai Komposit						1.7	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPR merupakan BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- dengan komposisi Direktur Utama dan Direktur Operasional.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang berbeda namun masih dalam provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak memiliki jabatan lain pada Perusahaan lain dan tidak terlibat dalam organisasi politik.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris lainnya.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan jasa profesional khusus sebagai konsultan. Setiap hubungan kerjasama yang dilakukan Direksi selalu tertuang dan terikat dengan Perjanjian Kerjasama yang sah.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan diangkat menjadi Dewan Direksi sesuai hasil RUPS Tanggal 13 Februari 2020.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,59	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan setiap tugas dan tanggung-jawabnya secara independen.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti setiap temuan OJK dan auditor ekstern dan selalu memonitor komitmen atas hasil tindak lanjut temuan-temuan tersebut namun periode 2021 BPR belum memiliki auditor intern.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Core Banking System yang memadai menghasilkan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu, sehingga dapat membantu Direksi dalam penyampaian data dan informasi bagi Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap keputusan yang diambil dalam rapat dilakukan secara mufakat dan didasarkan pada visi dan misi BPR.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak mengambil keuntungan pribadi dari BPR dan hanya menerima yang menjadi hak-haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi berperan aktif dalam pengarahannya keikutsertaan pegawai dalam webinar, pelatihan atau sosialisasi yang dilaksanakan OJK maupun lembaga atau instansi lain yang menunjang peningkatan pengetahuan dan update terkini tentang perbankan dan hal lainnya yang dinilai mampu mendorong kualitas kinerja pegawai.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi BPR merupakan Direksi yang berkompeten yang menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya di BPR dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Pedoman dan tata tertib kerja Direksi ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisaris BPR No. 006/SK-KOM/ABK/9.2020
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,45	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Laporan pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemegang saham melalui RUPS selalu didasarkan pada data yang akurat dan informasi yang riil yang dapat dipertanggungjawabkan.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Setiap kebijakan yang ditetapkan selalu di informasikan kepada seluruh jenjang organisasi dan tertuang dalam Memo yang didokumentasikan dengan baik.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Notulen atau risalah rapat didokumentasi dengan baik sesuai urutan rapat yang dilaksanakan.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Periode 2021 BPR senantiasa turut serta dalam keikutsertaan webinar dan atau sosialisasi yang di laksanakan Otoritas maupun pihak eksternal lainnya yang meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh personil di satuan kerja masing-masing sehingga mendorong peningkatan kinerja BPR yang semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi melaporkan laporan penerapan tata lola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo dan majalah media BPR.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Modal inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000,- dengan komposisi 2 orang anggota Dewan Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Dewan Direksi yakni masing-masing dewan 2 orang.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test yang diangkat sesuai hasil RUPS pada tanggal 13 Februari 2020.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000,- Periode 2021 BPR tidak memiliki anggota Komisaris Independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Komisaris No. 005/SK-Kom/ABK/9.2020
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau Pejabat Eksekutif di BPR atau Bank Umum lainnya.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya juga dengan Dewan Direksi

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR tidak memiliki anggota Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris selalu mengevaluasi pencapaian dan target dalam rapat pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang dilaksanakan setiap bulannya dan rekomendasi yang disampaikan tertuang dan didokumentasikan dalam Risalah Rapat.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris selalu memantau dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan strategis BPR dengan mengevaluasi pencapaian BPR setiap bulannya
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Setiap pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional BPR ditetapkan sesuai aturan yang berlaku dan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Hasil tindak lanjut temuan audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan ke Dewan Komisaris.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya secara optimal, nampak dengan terselenggaranya rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara berkala.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil keuntungan dari BPR dan hanya menerima yang menjadi hak-haknya.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Sesuai tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Notulen atau Risalah rapat didokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Periode 2021 modal inti BPR kurang dari Rp. 80.000.000.000 belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Periode 2021 BPR belum memiliki Komite Audit dan fungsi audit intern dibawah Accounting dengan kontrol langsung Direktur Utama
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Periode 2021 BPR belum memiliki Komite Pemantau Risiko
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Periode 2021 BPR belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Periode 2021 BPR belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	Kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian terkait benturan kepentingan di atur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 013/SK-DIR/ABK/3.2020
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Periode 2021 tidak terdapat kegiatan atau transaksi terkait benturan kepentingan yang merugikan BPR.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;  dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	5	Periode 2021 BPR belum mengangkat Direktur Kepatuhan, fungsi kepatuhan menjadi tanggung jawab Direktur Operasional.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Anggota Direksi yang bertanggungjawab atas fungsi kepatuhan memahami dan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	5	Periode 2021 BPR belum memiliki pejabat eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	4	Meski belum memiliki pejabat eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan namun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan telah ditetapkan BPR dalam SK Direksi No. 007/SK-DIR/ABK/3.2020 Tanggal 24 Maret 2020.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Ketentuan intern, pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan telah ditetapkan BPR dalam SK Direksi No. 007/SK-DIR/ABK/3.2020 Tanggal 24 Maret 2020.
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	3,60	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Penyampaian laporan-laporan kepada OJK maupun otoritas lainnya sesuai aturan yang berlaku dan tidak melewati batas waktu penyampaian
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Direktur Operasional yang bertanggungjawab atas fungsi kepatuhan mendorong setiap satuan kerja BPR untuk berperan aktif dalam keikutsertaan sosialisasi, webinar dan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya yang mampu mendorong peningkatan kualitas SDM sesuai satuan kerjanya.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi Operasional yang bertanggungjawab atas fungsi kepatuhan melakukan pengawasan dan kontrol dalam pengoperasian BPR agar sesuai dengan kebijakan, prosedur dan peraturan yang berlaku
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	5	Periode 2021 BPR belum memiliki pejabat eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	5	Periode 2021 BPR belum memiliki pejabat eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	3,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,36	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan BPR.

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab fungsi kepatuhan disampaikan kepada Direktur Utama dan Komisaris pada awal tahun dan dilaporkan juga ke Otoritas Jasa Keuangan.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat penyimpangan dalam setiap keputusan dan kebijakan yang di putuskan Direksi namun dalam hal terjadi penyimpangan, Direksi akan segera melaporkan hal tersebut kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	5	Modal inti BPR kurang dari Rp 50,000,000,000,- dan untuk periode 2021 BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi audit internal, fungsi audit internal dikontrol aktif oleh Direktur Utama.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	5	Periode 2021 BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi audit intern.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	5	Periode 2021 BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi audit intern.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	5	Sesuai ketentuan dan struktur organisasi, audit intern bertanggung-jawab langsung kepada Direktur Utama, namun untuk periode 2021 BPR belum memiliki audit intern.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR telah melakukan rekrutmen dan pengembangan SDM yang membawahi fungsi audit intern dan efektif Januari 2022.
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	4,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Pedoman pelaksanaan audit intern BPR disusun dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 012/SK-DIR/ABK/03.2020 namun periode 2021 BPR belum memiliki audit intern.

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Setiap tahunnya BPR menunjuk pihak ekstern dalam hal ini Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan kaji ulang atau pemeriksaan laporan keuangan BPR.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	5	Periode 2021 BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi audit intern sehingga belum dilaksanakannya kegiatan audit intern secara memadai.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	5	Periode 2021 BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi audit intern sehingga belum dilaksanakannya peningkatan mutu ketrampilan audit intern.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	3,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	5	Periode 2021 BPR belum memiliki pejabat eksekutif yang membawahi fungsi audit intern.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit namun dikarenakan BPR belum memiliki pejabat eksekutif audit intern sehingga pelaksanaan fungsi audit intern periode 2021 belum dilaksanakan secara memadai.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai ketentuan yang berlaku, BPR selalu menyampaikan hasil pemeriksaan KAP kepada OJK setelah selesai dilaksanakannya exit meeting.

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Dalam hal dilakukannya pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif, BPR melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan KAP diputuskan dalam RUPS dan telah sesuai aturan dan standar yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR menunjuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui sebelumnya dalam RUPS.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyampaian hasil audit KAP dan Management Letter di laporkan oleh KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan management letter oleh KAP disampaikan kepada BPR tepat waktu sesuai tanggal kerjasama yang telah disepakati antara KAP dan BPR.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	5	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- dan untuk periode 2021 BPR belum menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Manajemen Risiko diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-DIR/ABK/3.2020.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR memiliki kebijakan pengelolaan risiko yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-DIR/ABK/3.2020.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dalam Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-DIR/ABK/3.2020 dan memutuskan setiap transaksi dengan nominal lebih besar Rp. 5.000.000,- memerlukan persetujuan dan otorisasi Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris setuju dengan kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-DIR/ABK/3.2020 dan mengevaluasinya. Dalam hal transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap transaksi tersebut.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Sebelum dilakukan transaksi, BPR melakukan identifikasi dan pengukuran dalam setiap kegiatan yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	Sistem pengendalian intern di terapkan di seluruh jenjang organisasi BPR.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sesuai ketentuan OJK, BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- menerapkan manajemen risiko dalam 3 risiko yakni risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Core Banking System yang memadai membantu BPR memperoleh informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi aktif mendorong dan mewajibkan seluruh jenjang organisasi untuk mengikuti pelatihan dan atau sosialisasi yang dilaksanakan oleh OJK dan atau otoritas lainnya sesuai dengan satuan kerja masing-masing yang dapat meningkatkan kompetensi SDM sesuai bidangnya masing-masing.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,57	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,63	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan APOLO
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak dalam kegiatan menerbitkan produk atau aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	Kebijakan dan prosedur terkait BMPK di tetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 046/SK-DIR/ABK/05.2021.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait dijalankan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.02/2017.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR setiap bulannya menyampaikan laporan terkait BMPK secara benar dan tepat waktu bersamaan dengan Laporan Bulanan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Periode 2021 BPR tidak menyalurkan kredit yang melampaui BMPK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Dewan Komisaris memberi persetujuan mengenai rencana bisnis yang disusun sesuai visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menggambarkan rencana Bisnis yang mencakup Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, dan/atau Rencana Strategis Jangka Panjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB).
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Pemegang saham BPR mendukung sepenuhnya rencana bisnis BPR salah satunya dengan penyediaan dana yang cukup besar dari Pemegang Saham berupa dana murah tabungan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	BPR menyusun rencana bisnis dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko agar pertumbuhan BPR dapat terarah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris berperan aktif dalam pengawasan terhadap rencana bisnis yang telah disusun dengan diadakannya rapat bulanan tentang evaluasi pencapaian BPR sesuai dengan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Dalam hal terdapat perubahan mengenai rencana bisnis, BPR akan menyampaikannya kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR selalu berupaya memelihara sistem informasi manajemen dan kualitas SDM yang kompeten sehingga dapat menghasilkan laporan-laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan publikasi BPR disusun sesuai ketentuan OJK.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan tahunan BPR disusun sesuai ketentuan OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Dalam operasinya, BPR selalu berpedoman pada ketentuan OJK, salah satunya dengan menerapkan prinsip Perbankan yang sehat melalui Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Idependensi, dan Kewajaran.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu menyusun dan menyajikan laporan keuangan maupun non keuangan berdasarkan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan tahunan dan publikasi BPR ditanda-tangani oleh 2 orang Direksi BPR dan disampaikan ke OJK secara tepat waktu.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan disampaikan secara triwulan dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arya Bira Karsa

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama BPR : PT. BPR Arya Bira Karsa  
Alamat : Jalan Raya Manado – Bitung, Kolongan Tetempangan  
Kota/Kabupaten : Minahasa Utara

Dengan ini Laporan Tata Kelola Tahun 2021 PT. BPR Arya Bira Karsa telah dibuat dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR dan Media atau Majalah Ekonomi.


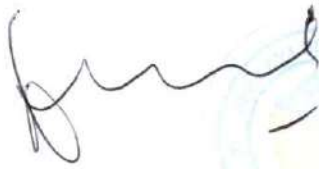
Minahasa Utara, 22 April 2022

Yang membuat,



THEREZA MICHIKO LABESI  
Audit Internal, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Persetujuan



ASWIN SONY WEMY KOTAMBUNAN  
Direktur Utama



BILLY DONALD KUMOLONTANG  
Komisaris Utama

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR ARYA BIRA KARSA  
Alamat : Jalan Raya Manado Bitung, Kolongan Tetempangan  
Kec. Kalawat Minahasa Utara  
No Telp : '04317008567  
Posisi Laporan : 31 Desember 2021  
Modal Inti : Rp. 5.020.625.000,-  
Total Aset : Rp. 81.241.223.931,-  
Status Audit : Ya  
Bobot BPR : B  
Nilai Komposit : 1,700  
Peringkat Komposit : Sangat Baik

### KESIMPULAN

Periode 2021 masih terdapat kekosongan pada struktur organisasi BPR untuk posisi pejabat eksekutif yang membawahi fungsi audit internal, manajemen risiko dan kepatuhan namun penerapan tata kelola yang baik sesuai aturan telah dilaksanakan oleh setiap satuan kerja di BPR. Hal ini ditunjukkan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan ke Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan aktif dari Dewan Komisaris yang nampak pada frekuensi kehadiran dalam rapat, pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Direksi yang dapat dilihat dari pertumbuhan nilai positif bisnis BPR pada funding, lending, laba dan aset. Dan untuk pemenuhan kelengkapan struktur organisasi khususnya dalam fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal sudah termasuk dalam rencana bisnis BPR yang akan direalisasikan di tahun 2022.

Minahasa Utara, 22 April 2022



ASWIN SONY WEMY KOTAMBUNAN  
Direktur Utama



BILLY DONALD KUMOLONTANG  
Komisaris Utama